

PEMANFAATAN APLIKASI SIKS-NG DALAM MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN

Rahmad Mulyadi^{1,*}, Lince Magriasti²

¹Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: rahmadmulyadi77@gmail.com

Abstract

Common issues that hinder the implementation of social welfare programs include inaccurate targeting, unreliable data, and weak inter-agency coordination. In response to these issues, the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia developed SIKS-NG, a cloud-based platform for managing the Unified Database of Social Welfare (DTKS). This study aims to examine how the Department of Social Affairs of Pasaman Regency utilizes SIKS-NG to support decision-making in social welfare programs. The research employs a quasi qualitative approach with informants selected through purposive sampling. Data were collected through document review, observation, and guided interviews with officials and SIKS-NG operators at the Department of Social Affairs. Data validity was ensured through triangulation, and analysis was conducted using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP), relying on responses from informants and collected data to draw conclusions. The findings indicate that the SIKS-NG application plays a significant role in enhancing the accuracy of program targeting, accelerating the verification and validation process, and supporting transparency in the distribution of aid. It has been confirmed that the decision-making process aligns with relevant regulations and that SIKS-NG has been implemented accordingly. However, several challenges remain, particularly regarding digital infrastructure and data integrity, due to suboptimal data integration between regional government institutions in synchronizing the SIKS-NG database.

Keywords : *Utilization, SIKS-NG, Decision-Making, Social Welfare*

Abstrak

Persoalan umum yang menghambat pelaksanaan program kesejahteraan sosial antara lain sasaran bantuan yang tidak akurat, adanya data yang tidak akurat, dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia menciptakan SIKS-NG, sebuah platform berbasis *cloud* untuk pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan SIKS-NG oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dalam mendukung pengambilan keputusan program keesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif semu. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara terbimbing dengan aparatur dan Operator SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi dan proses analisis data menggunakan teknik Manual Data Analysis Prosedure (MDAP). Karena mengandalkan pemeriksaan tanggapan informan dan data yang dikumpulkan selama wawancara untuk memperoleh kesimpulan. SIKS-NG membantu pengambilan keputusan program kesejahteraan sosial dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam model pendekatan Pengambilan Keputusan Berbasis Data (DDDM). Hasil penelitian disimpulkan bahwa aplikasi SIKS-NG berperan signifikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, mempercepat proses verifikasi dan validasi data serta mendukung transparansi dalam distribusi bantuan. Proses pengambilan keputusan telah diinformasikan bahwa SIKS-NG telah diimplementasikan sesuai ketentuan yang relevan. Namun, masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan dari segi infrastruktur digital dan ketidaklayakan data yang disebabkan pemadanan data antar institusi pemerintah daerah belum optimal untuk menyelaraskan basis data SIKS-NG.

Kata Kunci : *Pemanfaatan, SIKS-NG, Pengambilan Keputusan, Kesejahteraan sosial*

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui e-government melakukan inovasi baru dalam peningkatan sistem pendataan yang dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan efisiensi waktu sehingga lebih cepat dan akurat. Sistem pendataan yang ditingkatkan oleh pemerintah ialah upaya pemerintah untuk mengelompokkan data masyarakat sesuai dengan kategori dalam tingkat kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan masalah kemiskinan. Sekitar 9,78 persen penduduk Indonesia atau 26,4 juta jiwa hidup dalam kemiskinan pada Maret 2020. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, angka ini naik 25,14 juta jiwa atau 9,41%.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai keadaan di mana individu terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan memenuhi peran sosialnya. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah Indonesia dalam hal kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya dikenal sebagai PSE (Pendataan Sosial Ekonomi), DTKS merupakan basis data yang melacak program kesejahteraan sosial. Selanjutnya, PPLS (Pendataan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial) digunakan untuk memperbarui data setiap tiga tahun. Istilah ini berlaku sejak tahun 2008 hingga 2011. Pada tahun 2011, Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) menggantikan PPLS sebagai metode pengumpulan data yang digunakan BPS.

Dengan dibentuknya Pusat Data Kesejahteraan Sosial pada tahun 2016, Kementerian Sosial mengemban tanggung jawab pengelolaan data terpadu. Pada saat yang sama, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memutakhirkan data statistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih mengintegrasikan dan mengelola data kemiskinan yang terpercaya, maka dibangunlah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Selanjutnya (SIKS-NG) pada tahun 2017. Basis data SIKS-NG ini dikenal dengan nama Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Miskin (DT-PPFM). Basis data ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Miskin. Selain itu, pada tahun 2019, nama basis data ini diganti dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Aplikasi SIKS-NG mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 2017 oleh Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hingga Oktober 2017, aplikasi ini diluncurkan ke Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Dinas Sosial, berkat penerapan Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek). Aplikasi ini dibuat dalam versi desktop yang disebut SIKS-NG Offline dan versi web yang disebut SIKS-NG Online. Pada tahun 2019, SIKS-NG dirilis dalam platform Android atau yang dikenal juga dengan SIKS-Droid. Tanpa mencetak daftar awal rumah yang akan dikunjungi, teknik ini memudahkan pendata untuk memanfaatkan ponsel atau tablet guna memeriksa dan memvalidasi data saat melakukan kunjungan rumah.

Dalam hal ini, aplikasi SIKS – NG bermanfaat dalam proses pengambilan

keputusan dengan melihat data calon penerima program yang telah terkomputasi dalam aplikasi tersebut sebagai bentuk identifikasi masalah dan mengevaluasi berbagai program yang telah dilakukan sebelumnya melalui sumber data DTKS pada aplikasi SIKS-NG. Sejalan dengan program yang dijalankan Kementerian Sosial untuk menanggulangi kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat, aplikasi SIKS-NG membantu pengambilan keputusan program dalam menentukan apakah suatu masyarakat memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial.

Saat Dinas Sosial Kabupaten Pasaman mengimplementasikan aplikasi pendataan kesejahteraan sosial SIKS-NG pada Maret 2021, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian data dengan basis data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta adanya data ganda pada basis data SIKS-NG, khususnya pada NIK dan nama kecamatan. Selain itu, masih terdapat informasi penerima bantuan yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kategori atau standar penerima bantuan (fakir miskin). Kemudian Aplikasi SIKS – NG tidak berisikan informasi tentang keberadaan hasil dan dampak terhadap penerima manfaat dari program kesejahteraan sosial yang menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa, adanya kelemahan dalam pemanfaatan aplikasi ini sebagai sarana pengambilan keputusan program kesejahteraan masyarakat.

Pada bulan Februari 2023, penulis melakukan observasi lanjutan di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, melihat perkembangan aplikasi SIKS – NG. serta wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), beberapa staf

fungsional, juga admin pengelola DTKS terdapat beberapa hal yang berubah dari tahun sebelumnya, dimana periode pengusulan data tidak dapat ditentukan secara pasti bergantung pada kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Selain itu, akses internet yang mengalami gangguan (delay) dan server pusat dari aplikasi SIKS – NG yang menjadi salah satu faktor atau hambatan dalam proses pengelolaan data serta menu pengusulan yang terkadang menjadi masalah karena bisa saja pada hari pengusulan tidak muncul didalam aplikasi juga menjadi penghambat bagi pengelola data aplikasi untuk melakukan pengusulan data calon peserta DTKS.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, terlihat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dalam penggunaan aplikasi SIKS - NG. Diantaranya adalah kesalahan data dan kendala dalam validasi dan verifikasi data masyarakat pada database DTKS. Peneliti sangat antusias untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Pemanfaatan Aplikasi SIKS – NG Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Program Kesejahteraan Sosial Dan Kemiskinan Di Kabupaten Pasaman”**

METODE

Sering disebut sebagai "kuasi-kualitatif," metode penelitian ini. Alasan mengapa metode kualitatif masih dipengaruhi oleh Positivisme dalam penerapannya, khususnya ketika membahas ide-ide yang masih bersifat deduktif. Karena penelitian ini dimulai dari sudut pandang logis dan teoritis, desainnya pada dasarnya memiliki komponen positivis. Dari sudut pandang ini, seluruh desain berubah menjadi kuantitatif. Setelah ini, peneliti mengadopsi pola pikir induktif saat

beralih ke desain kualitatif untuk analisis data (Bungin 2020, 183).

Untuk mengetahui seberapa sering Dinas Sosial Kabupaten Pasaman menggunakan aplikasi SIKS-NG, proyek ini mengumpulkan data melalui observasi non partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dokumen dan melakukan wawancara untuk memperoleh data primer mengenai topik yang berkaitan dengan Pemanfaatan Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sumber data mengenai aplikasi tersebut. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menilai kebenaran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hartono (dalam Nugraha, 2018) e-government adalah pendekatan sistemik terhadap tata kelola yang memanfaatkan TIK (Informasi, Komunikasi, dan Teknologi) untuk memperlancar interaksi antara penduduk, dunia usaha, dan lembaga pemerintah serta para pegawainya. Menurut Gil Garcia (dalam Irawan & Hidayat, 2021), menekankan bahwa e-government bukan hanya tentang pemotongan biaya dan menjadi lebih cerdas dengan teknologi; tetapi juga tentang mencapai nilai-nilai yang mewakili pemerintahan yang baik, seperti transparansi, pembuatan kebijakan yang akurat, layanan publik yang lebih baik, dan lebih banyak keterlibatan masyarakat.

Istilah "e-government" menggambarkan metode yang digunakan pemerintah untuk memanfaatkan perangkat digital, seperti situs web dan platform aplikasi, guna membuat data dan informasi lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Berikutnya, yang dikembangkan untuk digunakan dalam kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, merupakan salah satu contoh program pemerintah yang menggunakan e-government untuk membantu pengambilan

keputusan. Untuk memulai proses validasi dan verifikasi penerima, sistem informasi SIKS-NG menyediakan daftar awal. Lebih khusus lagi, SIKS-NG terdiri dari banyak bagian yang bekerja sama untuk terus-menerus dan bertahap mengumpulkan, menganalisis, menampilkan, dan menyimpan data kesejahteraan sosial (Asrandi T et al., 2022). Menurut Intan Qonita N (dalam Nur, 2021), Tujuan dari perangkat lunak ini adalah untuk menyusun statistik kemiskinan terpadu yang akurat dan terkini. Untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan subsidi diberikan kepada penerima yang tepat, SIKS-NG digunakan untuk memantau dan memperbaiki data yang dikumpulkan di lapangan.

Berdasarkan hasil studi lapangan aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Pasaman, telah terlaksana e-government dengan menggunakan indikator katalogisasi yang dikemukakan oleh Layne dan Lee. Sistem informasi berbasis web ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan program dengan bantuan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Baru (SIKS-NG). Selanjutnya adalah proses transaksi. Berdasarkan temuan lapangan, metode ini melibatkan penyampaian data masyarakat melalui pengecekan data secara langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Melalui aplikasi SIKS-NG, masyarakat dapat menanyakan kepesertaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Setelah itu, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman akan meluncurkan program integrasi vertikal dan horizontal. Rencananya, pengumpulan data akan dilakukan secara berurutan, dimulai dari tingkat dusun ke atas.

Data yang terkumpul kemudian dicocokkan dengan basis data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh

instansi pemerintah di daerah memiliki data yang sama sehingga dapat tercipta data yang terintegrasi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang terlibat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data (DDDM), yang digunakan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini:

1. Objective (Tujuan)

Pengelolaan data didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengatur, menyimpan, dan memelihara data. Pengelolaan data meliputi proses pengajuan data, verifikasi dan validasi data, penentuan kebutuhan data, dan pemanfaatan data untuk menjamin aksesibilitas, keandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pemanfaatannya bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 1 poin (2)).

Didasarkan pada temuan lapangan yang dilakukan penulis mengenai aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman diketahui bahwa aplikasi ini menggunakan basis data yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian di input kedalam aplikasi.

Tujuan pemanfaatan SIKS-NG pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman adalah untuk menampilkan data / informasi yang akurat, akuntabel terverifikasi dan tervalidasi yang dapat digunakan sebagai media pengusulan data KPM guna mendukung pengambilan keputusan program kesejahteraan sosial dan kemiskinan.

Sistem informasi kesejahteraan sosial berbasis elektronik, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Baru (SIKS-NG), merupakan salah satu upaya pemanfaatan TIK dalam kesejahteraan sosial. Sistem ini menghimpun data dan informasi dari masyarakat.

2. Identifikasi dan Pengumpulan Data

Dalam pengambilan keputusan diperlukan identifikasi terhadap data yang diperlukan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Terkait kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang cukup krusial dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Maka dari itu, kebutuhan akan data sebagai pedoman dalam langkah – langkah pengambilan keputusan program diperlukan koordinasi pemerintah daerah kota/kabupaten untuk tersedianya data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus diselaraskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Kesamaan data akan mempermudah dalam pengusulan DTKS dalam SIKS – NG, maka dari itu perlunya koordinasi antar instansi untuk menghasilkan data yang valid dan terintegrasi.

3. Organize

DTKS merupakan *big data* yang di himpun dan dikelola oleh dinas sosial kabupaten pasaman, yang berisi informasi terkait Nama, NIK, dan identitas masyarakat yang telah dikategorikan. Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dalam hal ini berperan mengumpulkan, memilah dan menyusun serta mengidentifikasi setiap data kedalam basis data DTKS dengan alur pengusulan data sebagai berikut:

- a. Proses pengusulan data dilakukan melalui pengusulan data dari Kelurahan / Nagari setempat yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.
- b. Setelah usulan data dari kelurahan / nagari diterima oleh dinas sosial, data akan di verifikasi dan validasi oleh bupati / walikota.
- c. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dapat menyampaikan data yang telah diverifikasi dan disahkan oleh bupati atau walikota ke dalam Sistem SIKS-NG.

- d. Pemerintah provinsi akan menerima data dari pemerintah daerah/kota melalui SIKS-NG setelah data tersebut terautentikasi dan terkonfirmasi. Data ini kemudian akan dikirim ke Kementerian Sosial.
- e. Setelah pemerintah provinsi menyampaikan usulan datanya kepada menteri, maka faktor-faktor berikut akan digunakan untuk memilih standar integritas data:
 - 1) informasi khusus per orang bersifat unik dan berbeda.
 - 2) Badan pemerintah yang mengawasi urusan kependudukan dan pencatatan sipil memiliki nama, alamat, dan nomor registrasi penduduk individu dalam catatan mereka.
 - 3) Set data yang terdiri dari catatan individu dikenal sebagai catatan keluarga, kelompok, atau komunitas.
 - 4) informasi yang berkaitan dengan satu anggota keluarga tidak sama dengan informasi anggota keluarga lainnya.
 - 5) keakuratan dan kelengkapan properti data.
- f. Kami akan mengembalikan data yang diminta kepada pemerintah daerah/kota untuk dilakukan perbaikan data apabila ditemukan data yang tidak memenuhi standar integrasi data.
- g. Untuk diputuskan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Menteri menerima hasil usulan data yang telah memenuhi standar integrasi data sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.

4. *Analysis*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Permensos), seluruh kabupaten dan kota di Indonesia wajib melakukan verifikasi dan validasi data. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Selanjutnya (SIKS-NG) dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengefisienkan dan mengendalikan proses validasi dan verifikasi data. Program ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data statistik kesejahteraan sosial secara cepat dan mudah. Berdasarkan temuan di lapangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, SIKS – NG merupakan aplikasi yang dimanfaatkan dalam pengusulan, perbaikan data dan verifikasi serta validasi data masyarakat guna menyelaraskan kesamaan antara data masyarakat antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat menggunakan pengklasifikasian data dengan menganalisis wilayah, tren dan evaluasi program sebelumnya.

5. *Conclusion*

Setelah melalui beberapa tahapan dari identifikasi masalah dan pengumpulan data, organize, dan analysis terhadap data serta tools yang digunakan, maka didapatkan hasil yang mana SIKS – NG sebagai aplikasi yang memuat data DTKS memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan program – program kesejahteraan sosial yang di selenggarakan oleh pemerintah, diantaranya:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
- c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- d. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
- e. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

Penyelenggaraan program bantuan kesejahteraan sosial melalui basis data DTKS pada SIKS-NG dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terkini, untuk menganalisis dan membuat kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Basis data ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat untuk mengelola data dan informasi masyarakat melalui aplikasi SIKS-NG.

6. Implementasi dan Monitoring

Setelah Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menerima, memverifikasi dan memvalidasi kembali data dari pemerintah daerah / kota dan menetapkan siapa saja yang masuk kedalam DTKS sebagai Keluarga Penerima Manfaat dari program kesejahteraan sosial, pemerintah perlu melakukan monitoring terhadap data – data KPM secara berkelanjutan (sustainable). Dengan melibatkan Dinas Sosial selaku pihak yang menggunakan (user) aplikasi SIKS – NG di kabupaten Pasaman.

Untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, terkini, dan dapat dilacak, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman melakukan pemantauan data DTKS yang terdapat dalam Aplikasi SIKS - NG. Dinas Sosial juga melakukan peninjauan data masyarakat, melaporkan setiap perubahan data, dan melakukan perbaikan data secara real time melalui aplikasi.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pemanfaatan Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman

1. Faktor Penghambat

Pemanfaatan aplikasi SIKS-NG diantaranya masih terdapat data-data yang tidak layak untuk di usulkan kedalam Keluarga Penerima Manfaat melalui proses verifikasi dan validasi data untuk di teruskan ke kementerian sosial, yang masih menjadi

pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman untuk terus melakukan pemadanan data yang lebih maksimal dengan instansi atau pihak-pihak terkait dalam rangka pemadanan data bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pusat Statistik. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang mana ini berkaitan dengan permasalahan Jaringan Internet dan *server down*, dengan begitu akan menghambat proses pengusulan maupun pengecekan data masyarakat

2. Faktor Pendukung

Ketersediaan DTKS sebagai *Big Data* pada aplikasi SIKS-NG dalam mendukung pengambilan keputusan dengan melihat informasi atau data masyarakat mana yang akan menjadi sasaran diantara program-program kesejahteraan sosial yang telah ada maupun sebagai sumber data yang digunakan untuk pengambilan keputusan program-program kesejahteraan sosial oleh pemerintah di masa yang akan datang. Faktor kedua sebagai pendukung pemanfaatan aplikasi ialah adanya transparansi akan data yang dapat dikonfirmasi oleh masyarakat melalui pengguna atau user SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman untuk melihat sejauh mana data masyarakat yang diproses atau diusulkan sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat dalam program-program kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Pemanfaatan Aplikasi SIKS – NG Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Program Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, yang di kelola oleh Dinas Sosial sudah dapat dikatakan mampu untuk memfasilitasi pemerintah dalam mengimplementasikan program – program kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS – NG sebagai penunjang informasi dan data yang

diperlukan oleh pemerintah terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun saran yang dapat diberikan Bagi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman sebagai pengelola serta pengguna Aplikasi SIKS-NG untuk mengurangi dan menghindari kesalahan akibat data yang tidak valid dan terus melakukan pemantauan terhadap data – data anomali atau tidak layak untuk menciptakan sistem informasi berbasis big data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lebih terintegrasi serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pengambilan keputusan program kesejahteraan sosial dari pemerintah dan kementerian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrandi T, A. M., Wati, S. A., Wahab, A., & Alfian, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1294–1305.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v3i09.695>
- Badan Pusat Statistik.(2020) Persentase Penduduk Indonesia Tahun 2020 Dikutip dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
- Bachtiar, M. (2024). Cylinder : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Penerapan Data Driven Decision Making dalam Perspektif Pemilik dan Operator Kapal. *Cylinder: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 10, 7
- Bungin, B. (2020). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2021). Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods, Positivism-Postpositivism, Phenomenology-Postmodern, Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). E-Government : Konsep, Esensi dan Studi Kasus (P. Akbar (ed.)). Mulawarman University Press.
- Mariono, S. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://repository.unair.ac.id/80061/>
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, M. (2021). *Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13405-Full_Text.pdf
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.

<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/758>

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, basis data yang digunakan dalam SIKS -NG ini diberi nama Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT – PPFM).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1464/1072>

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.